

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI DINAS KOPERASI  
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana program Strata Satu (SE.Sy) Ekonomi Islam



JUMINARNI  
10725000263

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU**

**RIAU**

**2012**

# ABSTRAK

## PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Penelitian ini di latar belakang oleh keberadaan Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang memberikan pinjaman kepada masyarakat Bangko dalam memperoleh dana, memberikan pembinaan manajemen usaha serta teknik pengusaha-pengusaha kecil. Pelaksanaan ini bertujuan membantu masyarakat pengusaha kecil menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Bangko.

Penelitian ini di lakukan pada Dinas Koperasi yang berlokasi di jalan Perniagaan No. 143 Bagan Siapi-API, Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui: Bagaimana pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil menengah di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dalam pelaksanaan program kemitraan kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap dampak dari pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian populasi (*purposive sampling*) dengan metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan diperoleh dari data penelitian adalah bahwa pelaksanaan program kemitraan Dinas Koperasi terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini memiliki empat aspek yaitu, aspek pembinaan manajemen usaha, aspek pembinaan keterampilan, aspek pembinaan pemasaran, dan aspek pembinaan modal kerja belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh Dinas Koperasi karena terbatasnya dana operasional. Adapun dari segi kendala-kendala dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha ini sering terjadinya kemacetan dalam pembayaran yang jatuh tempo sehingga pihak Dinas Koperasi sulit untuk menjalankan dan menyalurkan dana itu kepada usaha kecil yang lain. Dalam pandangan Ekonomi Islam setiap usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam itu adalah haram demikian juga halnya dengan Dinas Koperasi dalam pembayaran tiap bulannya dikenakan bunga (Riba).



## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Swt Rabb seru sekalian alam yang melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga telimpah kepada nabi termulia, Nabi Muhammad Saw. yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman,islam dan ukhuwah.

Skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL MENENGAH DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada:

1. Ayahanda Ma'as dan ibunda Kartini yang tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta pembantu Rektor.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Bapak Prof. Dr. Mahdini, MA dan ketua jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. Msi dan sekretaris jurusan bapak Darmawan Tia Jaya, M.Ag yang telah memberikan kesempatan, perhatian dan fasilitas kepada ananda selama pendidikan dan khususnya selama penulisan skripsi.



M. IHSAN .M.A  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi Ekonomi Islam  
Sdri. Juminarni

Pekanbaru,14 Desember 2011  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN Suska Riau  
di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Dengan Hormat

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Juminarni yang berjudul” **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” , telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam(S.E.I) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara Juminarni, dipanggil dan diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Demikian lah harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Pembimbing

**M. IHSAN. M.A**  
**NIP. 19691012199703 1 005**

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Swt Rabb seru sekalian alam yang melimpahkan rahmat dan hidayah nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga telimpah kepada nabi termulia, Nabi Muhammad Saw. yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman,islam dan ukhuwah.

Skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL MENENGAH DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada:

1. Ayahanda Ma'as dan ibunda Kartini yang tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik ananda selama ini, sehingga sampai pada perguruan tinggi hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta pembantu Rektor.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Bapak Prof. Dr. Mahdini, MA dan ketua jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. Msi dan sekretaris jurusan bapak Darmawan Tia Jaya, M.Ag yang telah memberikan kesempatan, perhatian dan fasilitas kepada ananda selama pendidikan dan khususnya selama penulisan skripsi.

4. Bapak Ikhsan M.A selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis, terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, serta karyawan/ karyawati fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan membantu ananda selama perkuliahan ini.
6. Bapak pimpinan dan karyawan/ karyawati Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah serta masyarakat usaha kecil di kota Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan bimbingan dan informasi mengenai penulisan skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
7. Keluargaku : adik-adikku tersayang Lilis, Dani dan Imuz, terima kasih atas segala bantuan, motivasi yang selalu diberikan
8. Kakakku sri wahyuni, S.Pdi, yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan ilmu kepada penulis, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.
9. Teman-temanku tercinta : Andre Wahyudi, Irham, Leni, Gadist, juli, Vani, Roza, dan Farida. Berserta keluarga besar EI angkatan 07 spesial untuk EI B, terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan.

Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah disumbangkan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Swt, Amin...

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dari bapak dan ibu dosen terutama dosen pembimbing yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Wassalam  
Pekanbaru,

JUMINARNI  
Nim: 10725000263



# ABSTRAK

## PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Penelitian ini di latar belakang oleh keberadaan Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang memberikan pinjaman kepada masyarakat Bangko dalam memperoleh dana, memberikan pembinaan manajemen usaha serta teknik pengusaha- pengusaha kecil. Pelaksanaan ini bertujuan membantu masyarakat pengusaha kecil menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta berkembang menjadi usaha menengah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Bangko.

Penelitian ini di lakukan pada Dinas Koperasi yang berlokasi di jalan Perniagaan No. 143 Bagan Siapi-API, Penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui: Bagaimana pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil menengah di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dalam pelaksanaan program kemitraan kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap dampak dari pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian populasi (*purposive sampling*) dengan metode pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan diperoleh dari data penelitian adalah bahwa pelaksanaan program kemitraan Dinas Koperasi terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ini memiliki empat aspek yaitu, aspek pembinaan manajemen usaha, aspek pembinaan keterampilan, aspek pembinaan pemasaran, dan aspek pembinaan modal kerja belum sepenuhnya efektif dilaksanakan oleh Dinas Koperasi karena terbatas nya dana operasional. Adapun dari segi kendala-kendala dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha ini sering terjadinya kemacetan dalam pembayaran yang jatuh tempo sehingga pihak Dinas Koperasi sulit untuk menjalankan dan menyalurkan dana itu kepada usaha kecil yang lain. Dalam pandangan Ekonomi Islam setiap usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam itu adalah haram demikian juga halnya dengan Dinas Koperasi dalam pembayaran tiap bulan nya dikenakan bunga (Riba).

## DAFTAR ISI

Persetujuan .....	
Pengesahan .....	
Kata Pengantar .....	
Abstrak .....	
Daftar isi.....	
Daftar table.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Metode Penulisan .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
A. Latar Belakang Berdirinya Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	15
B. Kondisi Geografis Kecamatan Bangko .....	21
C. Perkembangan Penduduk dan Aspeknya .....	21

D. Agama dan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	25
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>30</b>
A. Kemitraan dan Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah .....	30
B. Langkah- Langkah dan Aspek yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan .....	33
C. Usaha kecil dan Hal-Hal yang Berkaitan Dalam Pelaksanaan Program Mengembangkan Usaha .....	35
<b>BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR .....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	44
B. Kendala- kendala yang Dihadapi Dinas Koperasi Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Usaha Kecil di Kecamtan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	49

C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dampak Dari Pelaksanaan Program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil di Dinas kopersail di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir .....	55
--	----

<b>BAB V KESIMPULANDANSARAN</b> .....	63
---------------------------------------	----

A. Kesimpulan.....	63
--------------------	----

B. Saran.....	65
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1	Perkembangan Penduduk Kecamatan Bangko Tahun 2006-2010.....
TABEL 2	Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Kecamatan Bangko Tahun 2010 .....
TABEL 3	Jumlah Penduduk Kecamatan Bangko Menurut Agama Yang Di Anut.....
TABEL 4	Sarana Peribadatan Desa Kecamatan Bangko.....

## **A. Panduan observasi**

Yang menjadi sasaran objek observasi oleh penulis adalah bagian pelaksanaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di dinas koperasi

1. Bentuk-bentuk pelaksanaan bantuan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di dinas koperasi kecamatan bangko kabupaten rokan hilir
2. Bantuan program kemitraan, pada bagian ini penulis akan melihat bagaimana bantuan program kemitraan usaha kecil dan menengah (UKM), menurut pandangan islam pada masyarakat Kecamatan Bangko
3. Prosedur untuk memperoleh dana, dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapat pembiayaan/ dana diperoleh dari dinas koperasi
4. Keadaan masyarakat, setelah berdirinya usaha kecil dan menengah (UKM) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Apakah masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya
5. Visi dan misi dari usaha kecil dan menengah yang ada pada Kecamatan Bangko di dinas koperasi

## **B. Panduan wawancara**

Yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah pimpinan serta karyawan yang bekerja pada usaha kecil dan menengah (UKM) di dinas koperasi. Berikut adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber

**a. Pimpinan usaha kecil menengah (UKM) dinas koperasi**

1. Dari mana asal bapak, sudah berapa lam kerja di dinas koperasi ini ?
2. Apa saja bentuk- bentuk pelaksanaan bantuan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah ?
3. Apakah ada visi dan misi usaha kecil dan menengah Ukm ini yang bapak kembangkan ?
4. Apakah ada faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha kecil dan menengah ? apabila ada bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini ?
5. Menurut bapak sejauh mana pemerintah daerah kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan usaha ?
6. Apa yang menyebabkan terjadinya kendala dalam aspek pembinaan manajemen usaha?
7. Bagaimana ekonomi/ pendapatan masyarakat di kecamatan bangko kabupaten rokan hilir sesudah atau sebelum berdirinya UKM ?
8. Dari mana dana bantuan bergulir itu di peroleh ?
9. Apa syarat dan prosedur untuk menerima dana bantuan dari dinas koperasi ?
10. Bagaimana harapan bapak mengenai pengembangan dan pembinaan UKM untuk kedepan nya ?

**b. Karyawan usaha kecil dan menengah UKM dinas koperasi**

1. Dari man asal saudara, sudah berapa lama bekerja di sini ?
2. Berapa pendapatan yang bapak peroleh setiap bulan selama bekerja di UKM dinas koperasi ?
3. Apakah anda setuju dengan berdirinya UKM ?
4. Apakah program tersebut membantu pengembangan / peningkatan ekonomi saudara ?
5. Apakah saudara merasa terbebani dengan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan dalam mengembangkan UKM ?
6. Apakah saudara merasa cukup dengan gaji yang diterima ?
7. Sudah berapa lama saudara menjadi mitra dalam pengembangan usaha kecil dan menengah ?
8. Bagaimana tanggapan dan harapan saudara kedepan naya terhadap program pembinaan dan pengembangan UKM ?



## **DAFTAR TABEL**

Tabel I	Perkembangan penduduk Kecamatan Bangko tahun 2006- 2010
Tabel II	Penduduk Menurut mata pencarian di Kecamatan Bangko 2010
Tabel III	Jumlah Pednuduk Kecamatan Bangko menurut Agama yang dianut
Tabel IV	Sarana peribadatan Desa Kecamatan Bangko
Table V	Jumlah penduduk Desa Kecamatan Bangko berdasarkan Suku

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 melaksanakan pembangunan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Dalam pembangunan nasional, usaha kecil dan koperasi sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan potensi dan peran strategis untuk mewujudkan peran perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk itu semua usaha berupa kegiatan-kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup>

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dunia usaha nasional. Dalam usaha mencakup dunia swasta (usaha kecil, menengah dan besar), BUMN dan koperasi. Ketiga dunia usaha ini harus melakukan sinergi diantara elemen yang ada, dan bukan berjalan sendiri-sendiri sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional.

---

<sup>1</sup> Drs, Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* ( Jakarta: Zikrun Hakim, 2004)

<sup>2</sup> Tambunan , *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia*, ( jakarta: PT. Mutiara Sumber Wijaya, 2002) hal 25

Dari ketiga dunia usaha nasional tersebut yang harus diperhatikan pemerintah adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Karena tidak jarang disebut bahwa masa depan perekonomian Indonesia ada pada usaha kecil dan menengah dan merupakan suatu prospek lapangan usaha bagi kegiatan ekonomi untuk masyarakat Indonesia dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan sektor ini dilambangkan sebagai sector yang tangguh, berdaya tahan prima pada era krisis ekonomi.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan dilaksanakan pembangunan perekonomian pada setiap negara agar terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat yang mana segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Usaha kecil dan koperasi yang merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional harus diberi peluang dan peran lebih besar karena merupakan tulang punggung perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yodoyono, pada tanggal 26 februari 2005 mencanangkan aksi penanggulangan kemiskinan melalui usaha mikro, kecil menengah (UKM), dengan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat berkurang selama kepemimpinannya. Program ini sudah jelas tertera dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 4 berbunyi” perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas

---

<sup>3</sup> *Dinas koperasi dan UKM. Perranan Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UKM* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006 ) hal. 33

<sup>4</sup> Panji Anoraga, *Koperasi kewirausahaan dan Usaha Kecil*, ( Jakarta: Rhineka Cipta, 2002 ) hal 15

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “ yang kemudaiian dicantumkan dalam PROPERNAS ( program pembangunan nasional 2000-2004) bab IV yang membahas pembagunan ekonomi yang arah kebijakannya mengacu pada pembangunan mikro, kecil dan koperasi

Pembangunan nasional pada hakikatnya berawal dari pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan kelompok- kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah itu sendiri.<sup>5</sup> Demikian juga halnya dengan program kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terhadap usaha kecil dan menengah. Adapun Program Kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dengan memberikan Fasilitasi kepada masyarakat Bangko dalam memperoleh dana, memberikan pembinaan manajemen usaha, teknik berproduksi kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kecamatan Bangko untuk mengembangkan usahanya supaya maju dan berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang.<sup>6</sup> Program kemitraan yang ada di Keamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir memiliki kontrak perjanjian

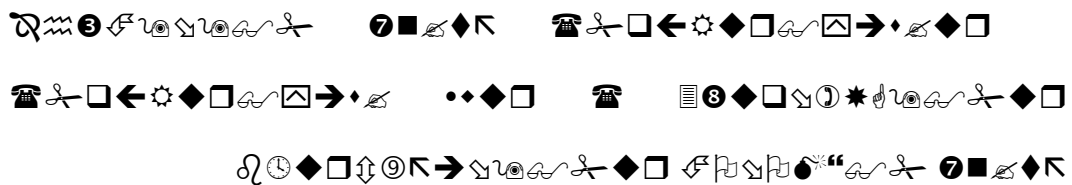
---

<sup>5</sup> Muhammad Fadel, *Industrialisasi Dan Wiraswasta Masyarakat Industri Belah Ketupat*: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004 ) hal. 5

<sup>6</sup> Masnuriadi ( Staf, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Bangko) Wawancara 12 Agustus, 2011

antara pihak pertama kepala Dinas Koperasi dengan Kepala Bank. Bank Rakyat Indonesia (BRI), masyarakat yang mendapatkan dana bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Dimana masyarakat yang mendapatkan dana harus membayar angsuran setiap bulannya demi kelancaran program kemitraan di Kecamatan Bangko. Pengembangan usaha rakyat dalam skala kecil diarahkan pemanfaatannya untuk membiayai kegiatan ekonomi rakyat di sektor perekonomian.<sup>7</sup>

Dalam ekonomi Islam kerjasama tergolong sebagai *syirkah*. Wadah ini merupakan wadah kemitraan, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Sedangkan Allah telah menjelaskan dalam Ayat Al-Qur'an surat Al-maidah ayat : 2



Artinya: ” *„Dan bekerja sama lah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan jagan lah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan” ( Q.S Al- Maidah :2)*

Namun, persoalannya selama ini usaha kecil yang ada di Kecamatan Bangko sulit dalam mengembangkan usahanya.<sup>8</sup> Salah satunya adalah keterbatasan modal meskipun sudah mendapatkan bantuan dana bergulir dari program kemitraan Dinas Koperasi Rokan Hilir. Usaha yang mereka

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), cet ke 2 hal.183

<sup>8</sup> Dedi Susanto (Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kecamatan Bangko) Wawancara, 15 Agustus 2011

jalankan khususnya belum mengalami perkembangan, modal kecil. Sulit untuk memenuhi pemesanan, sulit untuk mendapatkan kredit dari bank, masih kurangnya sumber daya manusia pendidikan yang rendah, rendah jiwa wirausaha, keahlian terbatas.<sup>9</sup> Disamping itu juga permasalahan lain yang dihadapi adalah penyaluran dana atau bantuan modal bergulir diberikan kepada pengusaha kecil untuk kegiatan produktif seperti mengembangkan usaha memperbesar usaha yang sudah ada, Karena sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan dana bergulir digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Tujuan pengelolaan dana bergulir digunakan ini adalah membuka dan memberikan kesempatan bagi unit usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengembangkannya serta memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir kerakyatan Rokan Hilir, dalam pemberdayaan usaha kecil.<sup>10</sup> Adapun bentuk-bentuk pola kemitraan antara lain inti plasma, sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan pola kemitraan dalam bentuk lain yang berkembang tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang dengan itu harus dipelihara komitmen yang besar terhadap upaya peningkatan usaha pada perkembangan tersebut.

---

<sup>9</sup> Thomas Zimmere, *Pengantar kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil* ( Jakarta: PT. Prehalindo, 2002 ) h. 15

<sup>10</sup> Hapsah, *Konsepsi Dan Strategi* ( Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan. 2000) h. 30

Dengan pertimbangan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk diteliti dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari hasil latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja yang menjadi permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi program kemitraan dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil di Dinas Koperasi di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dengan adanya pemberdayaan modal dari pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk mengetahui tujuan dan kendala-kendala bagi pelaksanaan kemitraan Dinas Koperasi sebagai Fasilitasi dalam memberikan modal terhadap usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Bangko Pusako
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah dan kendala-kendala program kemitraan dalam memberi modal untuk pengembangan usaha kecil yang di bina oleh Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dengan adanya penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah Kecamatan Bangko untuk mengambil sebuah kebijakan ekonomi atau merumuskan untuk mengembangkan usaha kecil dan ekonomi kerakyatan pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.



- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah, BUMN untuk terus meningkatkan bantuan program kemitraan kepada pemilik Usaha Kecil dan Menengah.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah (UKM) yang berlokasi di Bagan Siapi-Api di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko. Yang berada di jalan Perniagaan No. 143. Dipilihnya ini sebagai tempat penelitian karena daerah ini merupakan daerah yang relatif baru sehingga memunculkan permasalahan yang baru yang menarik untuk diselesaikan.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Bangko yang menerima bantuan dari Dinas Koperasi Rokan Hilir serta Staf Dinas Koperasi. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah program kemitraan dalam pengembangan terhadap Usaha-Usaha kecil dan Menengah

### **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori :

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari Pimpinan dan Staf Dinas Koperasi Rokan Hilir serta masyarakat yang telah

menerima dana bantuan dari pelaksanaan kemitraan Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir

- b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya pengembangan ekonomi Islam dan buku-buku yang lainnya yang ada relevansi nya dengan pembahasan

#### **4. Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf Dinas Koperasi dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah di Bagan Siapi-API yang berjumlah 4 orang dan masyarakat yang menerima bantuan dana bergulir yaitu 10 orang. Yang jumlah keseluruhan nya 14 orang. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini sedikit, maka keseluruhan populasi akan dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *provisivel Sampling*.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Yaitu suatu kegiatan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.<sup>11</sup> Dalam metode observasi cara yang paling melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian/ Suatu Pendekatan Praktek*. ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 229

instrumen. format yang di susun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang di gambarkan akan terjadi.

#### **b. Wawancara**

Yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik, pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Dalam hal ini pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai atau mula-mula interview menanyakan sederetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

#### **c. Studi dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penelitian, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, literatur, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain. Maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu rangkaian kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan untuk mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis kualitatif, yaitu menganalisis proses berlangsungnya fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena tersebut.<sup>12</sup>

Dalam menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah penelitian sosial cenderung bersifat (*thick deskriptio*), mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial realitas, dan semua atribut dari fenomena tersebut. Sedangkan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses sosial suatu fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa yang empirik yaitu peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari objek yang diteliti dan berkenaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek- subjek sosial yang diteliti. Sehingga terungkap suatu gambaran

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Kencana, 2008) hal.153

emik terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang tampak.

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif), yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar serta di bacanya ( via wawancara atau bukan, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain ). Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data. Penyajian atau display data, dan verifikasi. Reduksi data adalah data-data yang sudah dicatat diseleksi apakah masing-masing data tersebut bisa dimasukkan kedalam konsep kedalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh yang disebut dengan penyajian atau display data. Display data selanjutnya diverifikasi, yaitu membuat kesimpulan dari hasil reduksi dan display data tersebut.

#### **E. Metode Penulisan**

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum
- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teori, Metode Penelitian, metode penulisan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian**

Bab ini Menguraikan tentang Gambaran umum tentang sejarah berdirinya Dinas Koperasi, Struktur organisasi, visi dan misi dinas koperasi, tujuan dan sasaran dinas koperasi, kondisi Geografi Kabupaten Rohil Kecamatan Bangko Pusako, Perkembangan penduduk, Mata pencarian penduduk, keadaan masyarakat, agama, budaya dan keadaan pekerjaan.

### **BAB III : Tinjauan teoritik tentang program kemitraan**

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan ekonomi islam tentang pengertian program kemitraan, unsur-unsur kemitraan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengertian usaha kecil, kriteria-kriteria usaha kecil, kelemahan dan kelebihan usaha kecil di Kecamatan Bangko

#### BAB IV : Hasil dan pembahasan

Bab ini menguraikan Bagaimana pelaksanaan program Dinas Koperasi terhadap pengembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Kendala-Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program kemitraan terhadap usaha kecil dan menengah, Bagaimana dalam dari pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan kendala-kendala program kemitraan dalam memberi modal untuk pengembangan usaha kecil yang di bina oleh Dinas Koperasi Kecamatan Bangko

#### BAB V : Kesimpulan dan Saran





## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Berdirinya Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Dinas Koperasi usaha Kecil Menengah dan perindustrian perdagangan di Kecamatan Bangko Pusako Rokan Hilir adalah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 17 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu alternatif Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin dan ekonomi lemah yang tercecer dari pelayanan Pemerintah selama ini.<sup>1</sup> Pada umumnya masyarakat berada pada posisi pendidikan dasar, dan tidak mempunyai modal usaha, bahkan ada yang tidak mempunyai aset, yang dapat mendukung kehidupannya, mereka dengan modal otot yang ada, dan tidak mempunyai keahlian atau keterampilan khusus.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan pusat pelayanan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Ekonomi harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga menumbuhkan dan mengembangkan semangat, wirausaha masyarakat ekonomi lemah, melalui

---

<sup>1</sup> Dokumen Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2010

gerakan lembaga ekonomi kerakyatan Rokan Hilir dalam upaya pemberdayaan, guna mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang tertinggal menuju terciptanya ketangguhan, ketahanan, dan kemandirian.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang menyediakan dana dan dikelola secara bergulir dan menempatkan konsultan manajemen yang dapat mendampingi masyarakat.<sup>2</sup> Pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan dana pembangunan usaha kecil, dagang kecil, pertanian, serta koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk ekonomi lemah melalui pengembangan usaha kecil di Kabupaten Rokan Hilir. Bank yang ditunjuk sebagai pembayar / penyalur dana bergulir kepada usaha kecil pada program ini adalah Bank Rakyat Indonesia

Pengembangan usaha rakyat dalam skala kecil diarahkan pemanfaatannya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat di sektor usaha kecil, industri, dagang, koperasi, dan pertanian, antara lain melalui kegiatan dana bergulir, dampingan manajemen, pelatihan, promosi, dan lain-lain sesuai dengan kondisi atau potensi daerah.

#### 1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Sekretaris terdiri dari

---

<sup>2</sup> *Ibid*

1. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat
  2. Sub Bagian Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan
  4. Sub Bagian Perlengkapan
  5. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Dinas Pengembangan Koperasi terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Koperasi
  2. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian
  3. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Simpan Pinjam
  4. Seksi Koperasi Pengawai/ Karyawan
- d. Sub Dinas Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Usaha
  2. Seksi Perdagangan
  3. Seksi Pengembangan Jasa
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- a. Tugas Pokok
- Dinas Koperasi dan usaha kecil dan menengah kabupaten Rokan Hilir adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah. Desentralisasi, Dokumentasi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas pokok:

1. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi serta Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah
2. Mengkoordinasikan, Memajukan, Menyelaraskan dan Menyerasikan Kebijaksanaan dan Kegiatan Koperasi serta Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah
3. Menyusun Rencana Kerja dan Program Pengembangan Koperasi serta Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah
4. Melaksanakan Rencana Kerja dan Program Pengembangan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Pembinaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta peningkatan peranan dan kemampuan Usaha Kecil Menengah
6. Membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi serta Usaha Kecil Menengah di Daerah, penyediaan dukungan dan bantuan dan kerjasama pengembang Kerajinan, Koperasi serta Usaha Kecil Menengah di Daerah, Pengembangan Koperasi serta Usaha Kecil Menengah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
7. Membuat laporan sesuai prosedur yang ditetapkan, Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugas, memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang Koperasi serta

Usaha Kecil Menengah, melaksanakan pelatihan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati Rokan Hilir

8. Fungsi Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

9. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelayanan Umum dan Teknis, pengendalian/ Pengarahan/ Pembinaan dan Bimbingan
- b. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaksanaan Lapangan, Pelaporan, Penelitian dan Pengkajian.

3. Visi dan Misi Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

**Visi** “ Mewujudkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku utama dalam sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.”

**Misi** “ Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pelaku ekonomi yang tangguh dan professional, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang mempunyai daya saing melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, Perkuatan Kelembagaan, Srtuktur Permodalan, Pengembangan Teknologi dan jaringan Usaha Koperasi Usaha Kecil Menengah ( Kemitraan )

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

a. Tujuan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produktifitas dan Efisiensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Mengembangkan Usaha Koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan
2. Meningkatkan akses pasar dan jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemitraan), meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

b. Sasaran Pembangunan Keperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berbasis kerakyatan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Meningkatnya permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menunjang ekonomi kerakyatan, meningkatnya Kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan usaha besar ( perusahaan besar swasta, BUMN, BUMD)

## **B. Kondisi Geografis Kecamatan Bangko Pusako**

Kecamatan Bangko Pusako adalah salah satu daerah dari 13 Kecamatan yang di Kabupaten Rokan Hilir. Dilihat dari astronomisnya Kecamatan Bangko Pusako terletak antara 100 20 -100 40' Bujur Timur dan

1 30 – 2 30' Lintang Utara. Daerah ini berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut.<sup>3</sup> Dan jika dilihat dari geografisnya maka Kecamatan Bangko berbatasan dengan wilayah berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinaboi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Hampar dan Kecamatan Bangko Pusako
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kubu dan Selat Melaka
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kota Dumai

Kecamatan Bangko beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 28 C – 32 C dengan jumlah curah hujan per- tahunnya 2710 MM. Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan September, sedangkan musim penghujan berlangsung antara Bulan Oktober sampai dengan Februari.

### **C. Perkembangan Penduduk Dan Aspeknya**

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian. Tingkat perkembangan penduduk mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu penduduk merupakan suatu faktor penting dalam dinamika pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

---

<sup>3</sup> Sumber Kantor Kepala Desa Bangko Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Dokumentasi, Tanggal 15 Februari 2011

Dalam aspek penduduk dan perkembangannya disini akan dijelaskan mengenai perkembangan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan mata penccarian penduduk. lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan pada sub-sub sebagai dibawah ini:

#### 1. Perkembangan Penduduk

Dengan perkembangan penduduk dan peningkatan dalam pembangunan Nasional dari tahun ketahun juga membawa pengaruh terhadap pesatnya perkembangan penduduk di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. penduduk Kecamatan Bangko pada tahun 2005 telah mencapai 76.885 jiwa. <sup>4</sup> Hal ini memberikan gambaran tentang besarnya potensi usaha kecil yang mampu dikembangkan. Sebagai salah satu pusat usaha kecil tentunya di Kecamatan Bangko akan sangat tergantung kepada pelaku pengusaha kecil yang tersedia di wilayah tersebut.

Mengenai perkembangan penduduk Kecamatan Bangko Pusako di Kabupaten Rokan Hilir dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 1**  
**PERKEMBANGAN PENDUDUK KECAMATAN BANGKO TAHUN**  
**2006-2010**

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN PENDUDUK	PERTAMBAHAN (PERSENTASE)
----	-------	--------------------	-------------------------	-----------------------------

---

<sup>4</sup> Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako Dalam Angka 2010, Dokumentasi, Tanggal 15 Februari 2011



		(JIWA)		
1	2006	66.394	-	-
2	2007	71.273	4.879	6,85
3	2008	72.803	1.530	2,10
4	2009	74.735	1.932	2,59
5	2010	76.885	2.150	2,80

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako dalam angka 2010

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bangko Pusako dalam kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan bervariasi. Pertumbuhan penduduk yang paling tinggi adalah pada tahun 2006 -2007 yaitu sebesar 4.789 jiwa dengan pertumbuhannya sebesar 6,85%. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang paling rendah adalah pada tahun 2007-2008 yaitu sebesar 1.530 jiwa dengan pertumbuhannya sebesar 2,10%.

## 2. Mata Pencaharian Penduduk

Pola Usaha dan kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada tiap daerahnya. Ini disebabkan perekonomian tiap daerah dapat dicerminkan oleh berbagai faktor ekonomi sehingga menjadi indikator pada lapangan usaha dan mata pencaharian penduduk. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Bangko Pusako, dimana pola usaha dan kegiatan ekonomi tidaklah sama sebagai mata pencarian penduduk.

Kegiatan Usaha penduduk di Kecamatan Bangko Pusako terbagi kedalam dua sektor utama, yaitu penduduk yang bertempat tinggal di daerah daratan umumnya bergerak pada sektor pertanian, sedangkan penduduk yang berdomisili didaerah perairan baik di pinggiran sungai atau pantai lebih banyak bergerak disektor perikanan, baik sebagai nelayan atau pun pekerja industri pengolahan ikan.

Untuk lapangan Usaha yang paling besar dalam menyerap sektor tenaga kerja di Kecamatan Bangko Pusako yang merupakan wilayah kepulauan.<sup>5</sup> Untuk lebih jelasnya tentang pola mata pencarian penduduk menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 11**  
**PENDUDUK MENURUT MATA PENCARIAN**  
**DI KECAMATAN BANGKO TAHUN 2010**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	PERTANIAN	15.032	45,15
2	NELAYAN	12.427	37,32
3	PETERNAKAN	693	2,08
4	INDUSTRI	1.904	5,72
5	PERDAGANGAN	1.295	3.89
6	ABRI ( TNI)	208	0,62
7	PEGAWAI NEGERI	884	2,65
8	LAPANGAN USAHA	853	2,56

---

<sup>5</sup> Sumber : Kantor Camat Bangko Pusako, Dokumentasi, 2010

	LAINNYA		
	JUMLAH	33.296	100,00%

Sumber : Kantor Camat Bangko 2010

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yakni sebesar 15.032 yaitu 12.427 jiwa atau 37,32 % dan lapangan usaha industri yaitu sebesar 1,904 jiwa atau 5, 72%. Sedangkan lapangan usaha yang paling sedikit adalah ABRI hanya 208 jiwa atau 0,62 %.

#### **D. Agama dan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

##### **1. Agama**

Agama yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan manusia sangat penting eksistensinya, sehingga tidak boleh diabaikan. Untuk itu masyarakat dituntut untuk mengamalkan ajaran agama dengan sesungguhnya dan mengaplikasikan ajaran agama dalam berkehidupan beragama sehingga dalam masyarakat menjadi baik dan sempurna. Sebagian masyarakat yang beragama tentunya menghendaki nilai-nilai agama yang luhur dan universal dan dijiwai dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk itu masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan sarana ibadah masyarakat Kecamatan Bangko mempunyai sarana ibadah antara lain :

**TABEL III**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANGKO**  
**MENURUT AGAMA YANG DIANUT**

NO	AGAMA YANG DIANUT	JUMLAH	PERSENTASE
1	ISLAM	11.061	94,85 %
2	KRISTEN KATOLIK	300	2,57 %
3	KRISTEN PROTESTAN	300	2,57 %
4	HINDU	-	-
5	BUDHA	-	-
	JUMLAH	11661	100 %

Sumber data : Kantor Camat Bangko 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk kecamatan Bangko adalah menganut agama Islam yaitu berjumlah 11.061 jiwa. Atau 94.85 %, penganut kristen katolik berjumlah 300 jiwa. Atau 2.57 %, kristen protestan berjumlah 300 jiwa. Atau 2,57 %, sedangkan penganut agama Hindu dan Budha tidak ada di Kecamatan Bangko Pusako. Dalam kehidupan sehari-hari antar pemeluk agama tidak ada yang saling mengganggu. Bahkan diantara mereka saling menghormati dan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing. Dalam upaya membina kehidupan beragama, khususnya agama Islam di

Kecamatan Bangko telah ada sarana ibadah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1V**  
**SARANA PERIBADATAN DESA KECAMATAN BANGKO**

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	15
2	MUSHOLLA	9
3	GEREJA	3
4	PURA	-
5	WIHARA	-
	JUMLAH	20

Sumber data : kantor Camat Bangko 2010

Dengan adanya sarana peribadatan di atas, akan memudahkan pemeluk agama untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing dan membina kerukunan antar umat beragama

## 2. Sosial budaya

Dalam kehidupan masyarakat terdapat beraneka ragam corak dan bentuk adat-istiadat yang berkembang sebagai salah unsur warisan budaya. Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Lingkungan manusia merupakan unsur yang ikut memberi corak dan warna perilaku seseorang dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Adat istiadat sebagai salah satu produk masyarakat merupakan norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan antar sesama manusia, bahkan terkadang dalam masyarakat dapat dipertahankan dan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya yang nilai-nilai tersebut mengakibatkan munculnya suatu warna budaya masyarakat sehingga tradisi maupun adat itu menjadi identitas dari suatu masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Bangko merupakan salah satu masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam budaya penduduknya terdiri dari berbagai macam suku. Suku tersebut antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minang. Tetapi mayoritas penduduk adalah suku Melayu. Dengan demikian dalam berbagai kegiatan masyarakat menonjolkan adat suku Melayu misalnya dalam upacara perkawinan, khitan dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan suku dapat dilihat pada tabel berikut

**TABEL V**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN SUKU**

<b>NO</b>	<b>NAMA SUKU</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	MELAYU	10191	87,37%

2	JAWA	850	7,28%
3	BATAK	600	5,14%
4	MINANG	20	0,17%
5	CINA	-	-
	JUMLAH	11661	100%

Sumber data: kantor penghulu Kecamatan Bangko, 2010

Berdasarkan melayu yang berjumlah 10191 jiwa, diikuti suku jawa yang berjumlah 850 jiwa, suku batak 600 jiwa, suku minang 20 jiwa sedangkan suku cina tidak ada di desa Kecamatan Bangko.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu dan merupakan bahasa sehari-hari dikalangan masyarakat. Pada umumnya masyarakat suku lain mengerti dan mampu berbicara dalam bahasa melayu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *ibid*





### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN USAHA KECIL**

### **A. Kemitraan dan Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah**

#### 1. Pengertian kemitraan

Pengertian menurut para sarjana terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai kemitraan, untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan di paparkan beberapa pengertian kemitraan menurut para sarjana di antaranya adalah:

##### a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia

Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan, kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>1</sup>

##### b. Dr. Muhammad Jafar Hafsa

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis

---

<sup>1</sup> Martin Carnoy dan Derek Shearer, *Ekonomic Democracy*, Sharpe Inc.1980 hal. 275-276

c. Ian linton

Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 44 tahun 1997 tentang kemitraan, peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari undang-undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil salah satu cara/ upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan.

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah No. 44 tahun 1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

“kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”

Oleh sebab itu untuk mempercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan tersebut diatas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar usaha kecil di mulai tahun 1984 yaitu dengan undang-undang NO. 5 Tahun 1984 yaitu undang-undang pokok perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya.

Dalam Kepmenku RI NO.316/ KMK.016/1994 sebagaimana telah dirubah dengan kepmenku RI NO.60/KMK 016/ 1996 tentang” pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN”.<sup>2</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembagunan yang mandiri dan berkelanjutan (*self-profelling growth scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeahlian dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Berkaitan dengan kemitraan yang telah disebutkan di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu:

### a. Kerjasama

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra

### b. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Usaha Kecil

---

<sup>2</sup> Julius Bobo. *Transformasi Ekonomi Rakyat* ( Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,2003 ) hal

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya. Sehingga usaha kecil akan lebih berdaya atau tangguh didalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan manajemen produk.

**B. Langkah –Langkah dan Aspek yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan**

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program kemitraan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik:

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya
2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku- pelaku tersebut melalui program pendampingan

3. Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha
  4. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembina terhadap permodala, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>3</sup>
- a. Aspek- Aspek Yang di Pertimbangkan Dalam Mempersiapkan Program Kemitraan

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan program kemitraan yaitu:

1. Aspek pembinaan

Merupakan pembinaan baik SDM, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, dan teknologi

2. Aspek pembiayaan

Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMNS dalam bentuk community development (CD) sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM

3. Aspek kemitraan

Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri diperlukan adanya kerjasama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan

---

<sup>3</sup> A. Simarmata , *Reformasi Ekonomi*, ( Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI 1998), Cet. Ke,1, hal.117

#### 4. Aspek yuridis formal

Dalam sapek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karna tidak di iringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah.<sup>4</sup>

#### b. Hal- Hal Yang Harus di Perhatikan Pada Sistem Ekonomi Saat Ini Yang Akan Diarahkan Pada Program Kemitraan

1. Perhatikan karakteristik daerah serta latar belakang keahlian mayoritas masyarakat setempat
2. Kembangkan ekonomi berbasis rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keahlian mayoritas masyarakat setempat
3. Perhatikan ciri khas atau karakteristik daerah, dengan meningkatkan nilai(value) dari potensi yang ada
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui perbaikan infrastruktur atau fasilitas apapun agar ekonomi rakyat tumbuh.
5. Mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal/ UMKM dengan pemberdayaan pembentukan koperasi produktif.<sup>5</sup>

### **C. Usaha kecil dan Hal-Hal yang Berkaitan Dalam Pelaksanaan Program Mengembangkan Usaha**

#### 1. Pengertian usaha kecil

---

<sup>4</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa 2003), Cet. Ke,1,hal.14

<sup>5</sup> Ina primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009),Cet. Ke-2, hal.66

Ada dua pengertian usaha kecil yang dikenal di Indonesia dengan definisi usaha kecil menurut undang-undang no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah

“kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 miliar dan memiliki kerakyatan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta”

Sedangkan menurut kategori biro pusat statistik (BPS) usaha kecil identik dengan usaha kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaan yaitu:

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- b. Industri kecil dengan pekerja 20-19 orang
- c. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- d. Industri besar dengan pekerja 100 atau lebih.<sup>6</sup>

## 2. Undang –Undang dan Peraturan Tentang UKM

- a. UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
- b. PP No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
- c. PP No.33 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil
- d. Inpres No. 10 Tahun 1999 Tentang pemberdayaan Usaha Menengah
- e. Keppres No. 127 Tahun 2001 Tentang bidang/ jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

---

<sup>6</sup> Alila Pramiyanti, *Study Kelayakan Bisnis Untuk UKM*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2008), cet.ket-1,hal.6

- f. Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- g. Premeneg BUMN Per-05/ MBU/2007 tentang Program kemitraan Badan Usaha
- h. Premeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara
- i. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah.<sup>7</sup>

### 3. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil

Dalam UU No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang terdapat pada bab III pasal 5 usaha kecil memiliki Kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah
- c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau terafiasasi, baik langsung maupaun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.
- d. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zulkarnain, *op.cit*, hal. 98

<sup>8</sup> Arief rahman, *Peraturan UKM, Undang-Undang UKM*, www, google. Co. Id (diakses 15 oktober 2010)



#### 4. Kelemahan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha kecil menengah di anggap sektor usaha yang tahan banting karena UKM mampu bertahan tidak mengalami kebangkrutan meskipun krisis moneter melanda pada tahun 1997 namun UKM tetap Bertahan meskipun banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UKM yaitu:

##### a. Permodalan

1. Kurang nya akses bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya
2. Prosedur pemberian kredit yang berbelit, lama dan suku bunga tinggi
3. Bank kurang memahami kriteria usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga kredit yang di berikan tidak sesuai kebutuhan
4. Kurang mampunya komunitas UKM membuat standar proposal yang baik dan benar
5. Kurang nya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan pelaporan
6. Kredit yang diperlukan UKM tidak jelas atau tidak diketahui oleh pengusaha

##### b. Pemasaran

1. Akses terhadap informasi kurang
2. Terbatasnya tempat pemasaran
3. Kesulitan mencari agen atau pembukaan outlet, terutama diluar negeri

4. Kuatnya persaingan pasar dan produk
5. Kurang nya manajemen pemasaran
6. Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak

c. Bahan baku

1. Harga bahan baku yang mahal dan berpluktuasi akibat dorongan oleh pedagang besar yang mampu mengontrol harga
2. Bahan baku yang dibutuhkan tidak diproduksi lagi
3. Kesulitan penyimpanan dan pengiriman tidak tepat waktu
4. Prosedur impor bahan baku yang tidak jelas
5. Lokasi sumber bahan baku yang jauh

d. Teknologi

1. Kurang nya pelatihan untuk teknologi baru/tepat guna
2. Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru
3. Kurang informasi tentang teknologi baru atau tepat guna yang sesuai kebutuhan
4. Mahalnya pemeliharaan, harga yang mahal dan mutu yang rendah

e. Manajemen

1. Tidak ada pembagian kerja yang jelas
2. kuatnya pengaruh perseorangan
3. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga

4. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan
5. Asosiasi yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tidak ada jaringan pemasaran, tidak ada pelayanan dari pemerintah

f. Birokrasi

1. Kurang informasi tentang izin yang harus dimiliki, prosedur pengurusan, sistem pembayaran, waktu yang lama dan berbelit-belitnya pengurusan
2. Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan
3. Pungutan yang tidak jelas (sumbangan, pelican, calo, dll)
4. Adanya monopoli dan ketidak berpihakan pemerintah pada UKM

g. Infrastruktur

1. Tarif mahal dan pelayanan kurang
2. Kualitas/kuantitas kurang

h. Kemitraan

1. Sistem pemasaran bersama yang banyak merugikan UKM
2. Sistem pembayaran yang merugikan
3. Kurangnya transfer teknologi.<sup>9</sup>

5. Kelebihan Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki beberapa kelebihan di bandingkan usaha-usaha besar yang lainnya yaitu:

---

<sup>9</sup> *ibid*

- a. Pemilik merangkap menejer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi
- b. Dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru
- d. Resiko usaha menjadi beban pemilik, pertumbuhan lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan prematur
- e. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang
- f. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa, prosedur hukumnya sederhana dan pajak relatif ringan, komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi
- g. Mudah dalam proses pendiriannya, mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki, pemilik pengelolaan secara mandiri dan bebas waktu, pemilik menerima seluruh laba, umumnya mampu untuk survive
- h. Cenderung untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintis yang sama sekali baru sehingga memiliki sedikit pesaing
- i. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil
- j. Difersifikasikan usaha terbuka luas panjang waktu dan pasar konsumen senantiasa melalui kreatifitas pengelola

- k. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, sarana produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal
- l. Mempunyai ketergantungan secara moral dan semangat usaha dengan pengusaha lainnya.<sup>10</sup>

#### 6. Peran dan fungsi Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu:

- a. Penyediaan barang jualan
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup.<sup>11</sup>

#### 7. UKM Bertahan Menghadapi Krisis

Menurut Faisal Basri (2002) dalam kondisi krisis eksistensi UKM tidak terpuruk lebih dalam sebagaimana yang dialami usaha besar disebabkan beberapa faktor:

- a. Sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama
- b. Mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non banking finance dalam aspek pendanaan usaha

---

<sup>10</sup> Faisal Baasari, *Pembangunan Krisis kritik dan solusi menuju kebangkitan indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2003), Cet, ke-2, hal.6-7

<sup>11</sup> M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), cet ke-1, hal.28

- c. Pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam arti memproduksi barang atau jasa tertentu
- d. Terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungannya kerja disektor formal akibat krisis yang berkepanjangan

Selama kebijaksanaan pembangunan mencakup pengembangan perusahaan kecil dan menengah sebagai unsur pelengkap kebijaksanaan pengembangan industrinya, langkah-langkah yang akan diambil hendaknya di rancang untuk menciptakan secepat mungkin keadaan yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan kecil. Maka pemerintah harus membuat langkah- langkah sebagai berikut:

1. Sedikit mungkin peraturan, sebesar mungkin kebebasan dalam berusaha
2. Memperbaiki sistem informasi ekonomi
3. Integrasi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dalam organisasi-organisasi masyarakat
4. Menghapuskan hambatan untuk memperoleh kredit
5. Pelayanan pemberian nasehat teknis yang lebih baik
6. Memperbesar peluang untuk masuk pasar



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI DINAS KOPERASI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

#### **A. Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Pelaksanaan program kemitraan bantuan dana bergulir dan pembinaan terhadap usaha kecil yang dilaksanakan Dinas Koperasi di Kecamatan Bangko bertujuan untuk mendorong agar pengusaha usaha kecil dapat meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan pendapatan mereka.<sup>1</sup>

Semakin meningkatkan jumlah penduduk tiap tahunnya, dan juga dampak positifnya bagi perkembangan usaha kecil di Kecamatan Bangko. Sehingga membuat Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir melakukan survei ke lapangan untuk melakukan berbagai analisis prospek usaha kecil yang pada hakikatnya membantu, dengan menyalurkan bantuan modal usaha kecil atau dana bergulir ekonomi kerakyatan yang diperuntukan bagi para pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kecamatan Bangko.

Bagi pengusaha kecil yang ingin mengajukan permohonan bantuan dana harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Dinas Koperasi: syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Dinas Koperasi untuk mengajukan permohonan dana bantuan adalah:

---

<sup>1</sup> Masnuriadi ( Staf, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kecamatan Bangko) Wawancara , Bagan Siapi-Api, Tanggal 20 September, 2011



1. KTP (Suami dan Istri).
2. KK (Kartu Keluarga).
3. Photo 3x4 = 2 lembar suami/ istri
4. Surat Izin Usaha.
5. Jaminan.<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan pinjaman modal usaha harus menyetujui surat pernyataan yang menyanggupi tentang:

1. Setiap masyarakat yang mendapatkan dana pinjaman dari pihak Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir harus menggunakan pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha.
2. Pinjaman akan dibayar kembali dengan angsuran selama 24 bulan
3. Menyerahkan jaminan kepada Dinas Koperasi.
4. Apabila melalaikan kewajiban serta melanggar kewajiban pinjaman dana bergulir, atau masih ada pinjaman yang lama belum ada pengembalian hingga jatuh tempo, maka jaminan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir mempunyai wewenang penuh untuk menjual bebas dengan hak rententie yang di perhitungkan dengan sisa pinjaman nya.

Sedangkan yang menjadi ciri-ciri usaha kecil, baik itu usaha kecil yang bergerak dalam bidang dagang, peternakan, perikanan, pertanian,

---

<sup>2</sup> Dedi Susanto ( *Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kecamatan Bangko*)  
Wawancara, 20 September, 2011

yang akan menjadi sasaran dalam pelaksanaan kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki aset antara Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
2. Menghasilkan produk unggulan daerah
3. Mempunyai pangsa pasar yang luas
4. Menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat atau lokal
5. Diutamakan memiliki usaha dibidang industri rumah tangga, industri agro, industri kerajinan, atau yang mendukung kebudayaan.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan program kemitraan bantuan dana untuk usaha kecil Dinas Koperasi melakukan kegiatan pembinaan dalam usaha pembangunan sektor usaha kecil diarahkan dalam sub sektor usaha rakyat baik dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dilaksanakan pembinaan ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebagai program kerja dalam proyek pembinaan.

Jika diperhatikan program pembinaan usaha kecil di Kecamatan Bangko dalam upaya pengembangan usaha bagi para pengusaha kecil yang akhirnya meningkatkan pendapatan, meliputi empat aspek pembinaan yaitu:

1. Aspek pembinaan manajemen usaha

Aspek pembinaan manajemen usaha adalah merupakan pembinaan yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi di Kecamatan Bangko kepada

---

<sup>3</sup> Ina Primiana, *op. Cit*, hal. 45

para usaha kecil dalam bentuk pemberian bimbingan dan penyuluhan yang berisikan aspek perencanaan dan aspek administrasi.

Aspek perencanaan berisi tentang perencanaan atas produk, perencanaan keuangan, dan perencanaan persediaan dan logistik. Sedangkan aspek administrasi meliputi pembinaan pembukuan keuangan, sistem pencatatan aktiva atau harta yang digunakan dalam proses produksi.

## 2. Aspek pembinaan keterampilan pengusaha kecil

Pembinaan keterampilan merupakan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir kepada para pengusaha kecil di Kecamatan Bangko dalam bentuk bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan, dan pembinaan keterampilan. Pembinaan ini dilaksanakan agar pengusaha kecil dapat menambah pengetahuan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan sehingga dapat mencapai nilai standar penjualan. Pembinaan keterampilan yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir meliputi:<sup>4</sup>

- a. Keterampilan dalam mengelola keterampilan
- b. Keterampilan dalam memproduksi barang

Untuk meningkatkan keterampilan dalam memproduksi barang, maka pihak dinas koperasi telah memberikan keterampilan dalam bentuk kursus dana pelatihan, peraturan-peraturan, dana studi banding kedaerah lain yang juga mempunyai program yang sama

---

<sup>4</sup> Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Prakarsa, 1996), hal 14

### 3. Aspek pembinaan modal kerja usaha kecil

Pembinaan modal kerja merupakan pembinaan yang diberikan kepada pengusaha kecil berupa bantuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan bantuan dana bergulir. Bantuan ini sangat berguna sekali dalam menunjang kegiatan usaha para pengusaha kecil.

### 4. Aspek pembinaan pemasaran usaha kecil

Pembinaan pemasaran merupakan pembinaan berupa bantuan yang diberikan bimbingan langsung dalam memasarkan hasil produksi pengusaha kecil. Pembinaan pemasaran ini merupakan penyediaan informasi pasar.<sup>5</sup>

Seperti yang dialami Bapak Suwardi salah satu anggota yang memperoleh pinjaman dari Dinas Koperasi menyatakan bahwa, sebelum ada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya ia harus bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin karena tidak punya penghasilan tetap. Namun setelah adanya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Bapak Suwardi merasa lebih baik dari sebelumnya. Dengan modal kredit yang diterimanya dipergunakan untuk membuka warung sembako sehingga Bapak Suwardi mempunyai penghasilan tetap dari usaha warungnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Masnuriadi (Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kecamatan Bangko), Wawancara, Bagan Siapi-API, Tanggal 25 September, 2011

<sup>6</sup> Masnuriadi (Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Bangko), Wawancara, Bagan Siapi-API, Tanggal 25 September 2011

Pembinaan pemasaran dikatakan baik apabila penjualan hasil produktivitas dapat meningkat di atas 50% baik terhadap jualnya maupun jumlah produktivitas perbulannya. Sedangkan pembinaan pemasaran di katakan tidak mempengaruhi penjualannya.

**B. Kendala- Kendala Yang Dihadapi Dinas Koperasi Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Terhadap Usaha Kecil di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir**

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas Koperasi Kec. Bangko diantaranya:

1. Kendala dalam pembinaan keterampilan pengusaha kecil:

- a. Saat pemberian pembinaan dan pelatihan masih banyak yang tidak mengikutinya, sehingga sulit untuk mengetahui yang dihadapi para usaha kecil dalam menjalankan usahanya.
- b. Kurang nya sumber daya manusia, lemah nya sumber daya manusia, dapat di karenakan beberapa macam sebab, antara lain seperti budaya masyarakat, struktur masyarakat. Gejala yang tampil dari lemah nya sumber daya manusia adalah :
  - Lemahnya kemauan, merasa tidak mampu, tidak percaya diri dan merasa rendah diri, terbatas nya pengetahuan, terbatas nya keterampilan, tidak mampu menggunakan kesempatan dan peluang yang di berikan.

- Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terarah.
- c. Kurangnya informasi –informasi yang luas, aktual dan akurat agar dapat membuka ketertutupan pandangan dan wawasan, dan pada tahap selanjutnya,.
- d. Kurangnya motivasi dan arahan, yang dapat menumbuhkan semangat untuk melaksanakan sesuatu atau beberapa tugas pekerjaan dengan adanya kepercayaan diri yang kuat sehingga ada semangat untuk mewujudkan suatu tujuan peningkatan produktivitas dan kemampuan diri.
- e. Kurangnya metodologi dan sistem kerja, yang memberikan cara penyesuaian masalah dengan efektif dan efisien, secara terus menerus manusia potensial, aktual dan fungsional.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkaitan tinggi hanyalah ada satu jalan pemecahan yang harus di tempuh, yakni melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan lah yang akan meningkatkan kemauan, kemampuan dan kesempatan bagi seorang untuk berperan dalam kehidupannya, secara individu maupun masyarakat.

2. Kendala dalam aspek pembinaan pemasaran dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas Koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap usaha kecil di daerah Kecamatan Bangko berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat setempat permasalahan yang terjadi yaitu:

a. pelatihan

Kurang sadarnya masyarakat kecamatan bangko dalam mengikuti pelatihan baik pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan teknologi. Indikasi dari diadakan ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang kewirausahaan manajemen, dan administrasi sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya.<sup>7</sup>

b. Pemasaran

Bentuk sistem pemasaran hasil produksi di kecamatan bangko yaitu bentuk nya secara personal atau individu. Indikasinyadengan sistem pemasaran secara personal atau individu para pengusaha kecil dapat berhasil memasarkan hasil produksi secara personal atau individu melalui akses pasar di seluruh kecamatan bangko.

c. Kurangnya memberikan bantuan fasilitas pemasaran hasil produksi

Kurangnya dengan cara promosi serta perluasan jaringan pasar. Melalui bantuan pemasaran tersebut masalah hasil pemasaran produk dapat diatasi dan akhirnya akan meningkatkan jumlah penjualan.

---

<sup>7</sup> Dedi Susanto (Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil Kecamatan Bangko), Wawancara, 17 Januari 2012

1. Kendala dalam Aspek pembinaan manajemen usaha dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil menengah di dinas koperasi kecamatan bangko
  - a. Kurangnya perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
  - b. Kurangnya pengorganisasian dalam mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja dan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif
  - c. Kurangnya pengarahan dalam kegiatan mengarahkan semua karyawan , agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat
  - d. Kurangnya pengembangan dalam peningkatan keterampilan teknis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa depan.
2. Kendala dalam Aspek pembinaan modal pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.



- a. Di dalam pelaksanaan program kemitraan ini terbatasnya dana (modal) yang di salurkan oleh dinas koperasi kecamatan bangko kabupaten Rokan hilir
- b. Kurangnya peran pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di dinas koperasi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- c. Seringnya terjadi kemacetan dalam pembayaran yang telah jatuh tempo, sehingga pihak Dinas Koperasi sulit untuk menjalankan dan menyalurkan dana itu kembali kepada usaha kecil yang lain.<sup>8</sup>

Dari data diatas menurut hasil yang penulis peroleh, Jika dana sudah disalurkan maka Dinas Koperasi akan mengadakan pembinaan yang wajib diikuti seluruh pengusaha kecil yang telah mendapat penyaluran dana, seperti pembinaan manajemen usaha, pembinaan keterampilan pengusaha kecil, pembinaan modal kerja dan pembinaan pemasaran. Pelaksanaan dilakukan 1 bulan sekali namun masih ada pengusaha kecil yang tidak mengikutinya, hal itu menjadi suatu kendala bagi Dinas Koperasi untuk mengetahui-mengetahui apa yang dihadapi usaha kecil dalam menjalankan usahanya atau dalam pengembangan usaha yang sedang dijalankan.

Sedangkan kendala yang paling besar adalah kemacetan dalam pembayaran dan ketidak tertiban pembararan yang sudah jatuh tempo dimana pengusaha kecil tidak dapat membayar angsuran secara keseluruhan atas pinjaman yang diberikan oleh dinas koperasi serta tidak mampu memenuhi

---

<sup>8</sup> Masnuriadi (*Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Bangko*), Wawancara, Bagan Siapi-Api, Tanggal 20 September 2011

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, akibat dari kemacetan pembayaran tersebut terdapat ketidak pastian atas dana tersebut yang mana itu mempersulit Dinas Koperasi untuk mengelola dana tersebut yang akan disalurkan kembali kepada pengusaha kecil lainnya.

Banyak cara yang dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk menyelesaikan kemacetan dalam pembayaran tersebut tergantung sering atau tidaknya, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan maka Dinas Koperasi dapat memberi keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran tetapi apabila kemacetan pembayaran tersebut masih bisa diharapkan akan berjalan baik kembali.

Solusi yang dilakukan dinas koperasi dalam menghadapi kemacetan pembayaran adalah:

a. Memberikan surat peringatan

Pihak dinas koperasi akan mengirim surat peringatan kepada usaha kecil agar melunasi kemacetan pembayaran hutangnya dengan tempo waktu yang ditetapkan dinas koperasi

b. Jaminan ditahan atau akan menjadi hak milik dinas koperasi

Jika telah diberikan peringatan namun pihak usaha kecil tidak menghiraukannya dengan alasan yang tidak jelas maka pihak dinas koperasi maka jaminan sepenuhnya akan menjadi milik dinas koperasi

Usaha yang bermasalah kemacetan dalam pembayaran tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk mendapat bantuan dana dari dinas koperasi<sup>9</sup>

Strategi dalam mengatasi kendala-kendala seperti yang diatas agar terwujudnya program pengembangan usaha kecil diperlukan:

- a. Jangan ulangi kesalahan sebelumnya yaitu memberikan kredit tanpa faktor kehati-hatian. Perlu dibuat peraturan yang lebih jelas , misalnya kredit dapat tuun dan hanya dalam jangja pendek (1-3 bulan). Itu pun bila UKM tersebut sudah menunjukkan kemajuan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Diperlukan pelatihan yang bertujuan untuk merubah pola pikir/ paradigma sebagai seorang wirausaha agar usaha kecil menjadi kuat, kreatif dan produktif, misalnya pelatihan perubahan paradigma usaha, pentingnya kepuasan pelanggan meningkatkan kreavitas, inisiatif dan produktif dalam usaha.

**C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Program kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.**

Dalam Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari Rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi di perbolehkan dan tidak bertentangan dengan

---

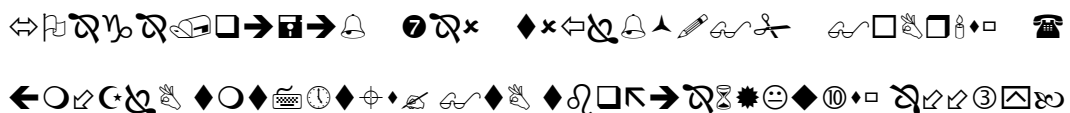
<sup>9</sup> Muhammad Amin, (*Sekretaris Dinas Koperasi*), *Wawancara*, Bagan Siapi-Api, Tanggal 23 September 2011

ajaran Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena Ridho Allah .

1. Dalam aspek pembinaan manajemen usaha

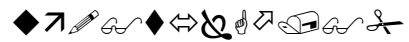
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aspek pembinaan manajemen kurang nya perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Kurangnya pengorganisasian dalam mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup>

Dalam Islam, pengorganisasian harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing tenaga kerja. Baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan mengatur sebuah usaha. Sesungguhnya keduanya merupakan kualitas yang penting bagi seorang organisator yang efisien dan berhasil. Mengingat sangat pentingnya organisasi dalam sebuah usaha, maka mutlak untuk mengangkat orang yang tepat dan yang benar-benar cocok serta berkualitas untuk sebuah pekerjaan. Pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dinilai dari kenyataan bahwa Allah dikenal sebagai Pengatur yang paling baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-imran ayat 7 sebagai berikut:



---

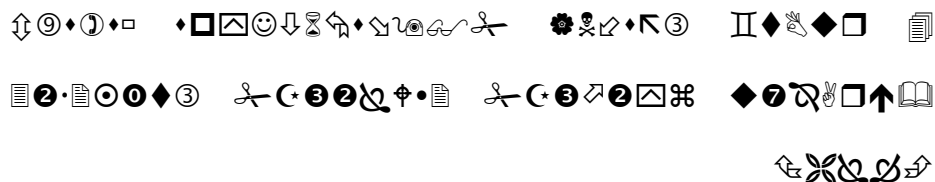
<sup>10</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997). h. 273-274.



Artinya: “*Bagi kami, Tuhanlah yang mencukupi, dan Dialah yang paling baik pengaturan-Nya dalam setiap urusan*”.

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diperingatkan untuk melakukan yang paling baik dan kemudian untuk mempercayakan urusannya pada penjagaan Allah, sebagai pengurus dan pengatur yang paling baik.

2. Dalam aspek pembinaan keterampilan usaha khususnya dalam pendidikan dan pelatihan, masih kurangnya perhatian masyarakat dalam pendidikan keterampilan dan pelatihan. Di dalam Islam, suatu usaha sangat membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Pendidikan dan latihan juga turut meningkatkan efisiensi. Seorang yang bekerja atau berusaha yang terlatih dan terdidik akan bekerja lebih efisien dibandingkan yang tidak terlatih dan tidak terdidik.<sup>11</sup> Keutamaan pendidikan dan latihan disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-baqoroh ayat 269 seperti yang terdapat di bawah ini:




---

<sup>11</sup> *Ibid. h. 241.*

Artinya: *“Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak”*.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan mempunyai manfaat yang banyak. Dengan demikian berarti al-Qur'an mengacu pada kualitas ini sebagai faktor yang sangat penting dalam berusaha.

### 3. Dalam aspek pembinaan pemasaran usaha kecil

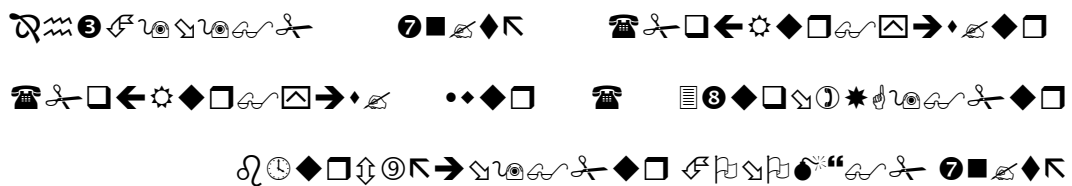
Pemasaran dalam Islam harus mengutamakan kejujuran dalam promosi dan penentuan harga sebuah produk yang akan mempengaruhi tingkat penjualan. Dalam kebijaksanaan produk juga diharuskan pihak pengusaha mengambil kebijaksanaan yang tepat supaya produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen sesuai criteria yang mereka inginkan. Dalam kebijaksanaan distribusi, pengusaha harus mencari cara yang paling efektif untuk dapat membina dan mendekati para pembeli sehingga produk-produk dapat sampai ke konsumen dengan efektif. Dan juga dalam promosi produk, kegiatan promosi yang dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran dalam Islam secara keseluruhan sehingga dapat berperan secara berarti dalam meningkatkan penjualan.

### 4. Aspek pembinan modal usaha kemitraan

Pemberian modal dana bergulir serta pembinaan usaha kecil di Kecamatan Bangko bertujuan untuk menolong masyarakat pengusaha kecil dalam meningkatkan pendapatan, karena dengan meningkatkan pendapatan para pengusaha kecil tersebut berarti dapat pula meningkatkan kesejahteraannya sehingga para pengusaha kecil

menengah kini usahanya dengan lebih terarah dan lebih giat lagi. Untuk menanggulangi masalah dan kendala yang dihadapi oleh para anggota peminjam maupaun calon peminjam pada dinas koperasi, Islam telah menentukan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus didasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip- prinsip yang bersumber al-Quran dan al-hadist.

Dalam Islam (pihak berpiutang) memberikan pinjaman kepada peminjam (pihak yang berhutang) hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang, hal ini sesuai dengan anjuran al- quran surat al-maidah ayat : 2



Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta jangan tolong- menolong dalam berbuat keji dan dan permusuhan.” (al-maidah: 2).<sup>12</sup>

Tolong menolong adalah merupakan prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.

Begitu juga halnya Islam melarang mengambil keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Pada realitanya dinas koperasi dalam menyalurkan pinjamannya melalui pembiayaan mudharabah dengan akad syirkah

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : CV. Toha Putra 1989)

menetapkan 2,5% bulan dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka dikenakan denda 2,5 % lagi dari pinjaman yang diperoleh nasabah.

Hal ini bertentangan dengan prinsip mudharabah itu sendiri dimana nisbah keuntungan itu harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40 jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, kemudian bagi untung dan bagi rugi artinya bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar pula dan begitu juga sebaliknya, filosofi ini hanya bisa berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu.<sup>13</sup>

Dalam islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang dapat oleh pelaksana usaha. Dalam pembayaran/angsuran peminjam. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal lagi bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Sebagai mana sabda rasulullah:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجه الربا

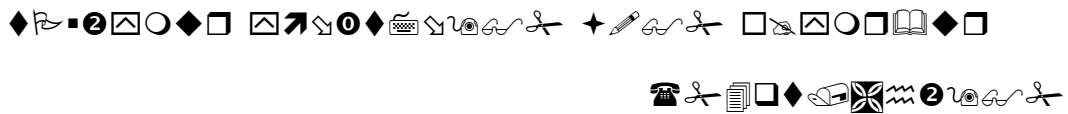
---

<sup>13</sup> Adiwarmarman Karim, *Perkembangan Industry Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 43



Artinya: “ Tiap- tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba” (HR. Al- baihaqi).<sup>14</sup>

Dalam hal ini Allah juga menegaskan dalam firmanNya:



Artinya: “ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al- baqarah: 275).<sup>15</sup>

Dalam ekonomi syariah, jika seseorang yang berutang atau peminjam dan tidak mampu membayarnya atau terjadi keterlambatan dalam pembayaran hutang atau pinjaman, maka penyelesaian adalah:

a. Diberi penundaan waktu pembayaran ( perpanjangan waktu pinjaman).

Tunggulah sampai ada kesanggupan untuk membayar.

Hal ini sebagaimana firman Allah



Artinya:” Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”(al- baqarah: 280).

b. Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai sedekah, karena dalam

<sup>14</sup> Al-Imam Al- Baihaqi, *al-sunan al-kubro* ( Beirut: dar al- kutb al-‘ ilmiyyah, 1999), cet. Ke- h. 571

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 69

islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin ( bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya boleh dihapuskan berdasarkan kerelaan pihak piutang.

Dinas Koperasi memberi bantuan dana bergulir serta pembinaan merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil dimana pelaksanaan bantuan dalam pendapatan .

Oleh karena itu pembangunan ekonomi rakyat yang bertumpu pada usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dalam jumlah unit usaha dan dalam jumlah tenaga kerja yang diserap merupakan jawaban bagi pencapaian kemandirian bangsa.<sup>16</sup> Sebenarnya pengusaha kecil dan menengah tidak perlu meminta perlakuan khusus untuk bisa berkembang dengan baik, tetapi yang lebih penting dan utama adalah menuntut perlakuan yang adil sehingga akses terhadap pasar dan sumber-sumber ekonomi yang ada bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku ekonomi secara efisien.

Dampak dari pelaksanaan pelaksanaan program lembaga dinas koperasi terhadap usaha kecil di kecamatan bangko berdampak positif seperti dalam bidang keterampilan, modal kerja dan pemasaran dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha yang mengikuti pembinaan pendapatan pengusaha kecil adalah penghasilan yang diterima oleh pengusaha kecil dalam bentuk keuntungan atau laba dari usaha yang

---

<sup>16</sup> Faud Moh. Facruddin, *Riba Dalam Bank Koperasi Dan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985) h. 68

dijalankannya. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan kenaikan jumlah pendapatan pengusaha kecil perbulannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penjabaran survey yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil menengah di dinas koperasi kecamatan bangko kabupaten rokan hilir. Dalam pelaksanaan program ini melalui empat aspek pembinaan yaitu: aspek pembinaan manajemen usaha pembinaan yang telah diberikan oleh dinas koperasi kecamatan bangko kepada para usaha kecil dalam bentuk pemberian bimbingan dan penyuluhan, aspek pembinaan keterampilan pengusaha kecil yang di berikan oleh dinas koperasi kepada pengusaha kecil dalam bentuk bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan, aspek pembinaan modal kerja usaha pembinaan yang diberikan kepada pengusaha kecil berupa bantuan dari pemerintah, aspek pembinaan pemasaran usaha kecil.
2. Dalam pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah melalui empat aspek. Dalam aspek pembinaan keterampilan kurangnya pemberi pembinaan dan pelatihan, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya informasi. Dalam aspek pemasaran kurang nya aspek pemasaran secara personal, kurang nya memberikan bantuan fasilitas pemasaran hasil produksi. Dalam aspek pembinaan

manajemen kurang nya tenaga kerja secara efisien dan efektif, kurangnya pengorganisasian, kurang nya pengarahan. Dalam aspek pembinaan modal usaha terbatasnya dana operasional yang disalurkan dinas koperasi, sering terjadi kemacetan dalam pembayaran tiap bulan nya, sehingga pihak dinas koperasi sulit untuk menjalankan dan menyalurkan dana itu kembali kepada usaha kecil yang lain.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di dinas koperasi kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melalui empat aspek yaitu aspek pembinaan keterampilan usaha, adapun solusi dalam Islam adalah dengan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga bisa lebih efisien dan efektif dalam berusaha. Aspek manajemen usaha, adapun solusi dalam Islam adalah dengan cara pengorganisasian yang sesuai dengan kemampuan tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan usaha yang lebih efisien dan efektif. Aspek pembinaan pemasaran produk, adapun solusi dalam Islam adalah Pemasaran dalam Islam harus mengutamakan kejujuran dalam promosi dan penentuan harga sebuah produk yang akan mempengaruhi tingkat penjualan serta distribusi produk yang efektif. Aspek pembinaan modal usaha dalam penyaluran dana kepada masyarakat tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam pembayaran tiap bulan di kenakan bunga (riba).

## **B. Saran**

1. Lembaga dinas koperasi Rokan Hilir bagan siapi-api sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin dan ekonomi lemah dalam memberikan pinjaman bantuan modal atau dana bergulir hendaknya lebih efektif lagi. Karena sebagian masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal bergulir di pergunakan untuk kebutuhan konsumtif dan tidak sesuai dengan tujuan lembaga dinas koperasi Rokan Hilir dalam pemberdayaan usaha kecil.
2. Lembaga dinas koperasi Rokan Hilir bagan siapi-api lebih meningkatkan perhatiannya kepada masyarakat yang ekonominya lemah dalam memberikan bantuan modal sebagai para pengusaha kecil dapat bergulir dalam mengembangkan usahanya dan mampu membangkitkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya sesuai dengan tujuan ekonomi kerakyatan.
3. Lembaga dinas koperasi Rokan Hilir dalam pelaksanaan terhadap pengembangan usaha, kecil, supaya dapat lebih efektif lagi dalam mendidik, membina dengan berbagai pelatihan- pelatihan kepada pengusaha kecil, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Perkembangan industri Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Alila Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008)
- A.Simarmata, *Reformasi Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1998)
- B.j. Habibie, *Liberalisasi Ekonomi/ Pemerataan dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995)
- Burhan Bungin, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Madya, 2004)
- Didik J. Robbani, *Ekonomi di Era Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Dinas Koperasi UKM, 2006, *Peranan Koperasi Dalam Pengembangan UKM*
- Faisal Baasari, *Pembangunan Krisis Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2003)
- Faud Moh.Facruddin, *Riba Dalam bank Koperasi dan Asuransi*, (Bandung:PT. Alma'arif,1993)

- Hafsah, M.Jafar, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000)
- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Jolius Bobo. *Transformasi Ekonomi Rakyat* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2003)
- Martin Carnoy dan Derek Shearer, *Economic Democracy* (Sharpe Inc. 1980)
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, ( Yogyakarta: PT. Pustaka Setia, 2005)
- Muhammad, Fadel, *Industrialisasi dan Wiraswasta Masyarakat Industri Belah Ketupat*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2004)
- Muhammad Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kansius, 2000)
- Pandji, Anoraga, jokosudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil* (Jakarta : Rhineka Cipta 2002 )
- Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2001)
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian/ suatu pendekatan praktek*. (jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996)



Tambunan, Tulus, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, (jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya 2002)

Thomas Zimere, Norman Scarbonough, *Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil*, *Person Education Asia Pte, Ltd* (jakarta : PT. Prehalindo 2002)

Titik, Sartika, *Ekonomi Skala Kecil dan Menengah dan Koperasi* (Jakarta :PT. Ghalia Indonesia 2002)

Zulkarnain, 2001, *Membangun Ekonomi Rakyat*, UNRI Press, Pekanbaru  
PT.Pustaka Setia, 2005)